



RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Balikpapan, 16 Februari 2023

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPD



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAGI DAERAH DENGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH BERAKHIR
PADA TAHUN 2023 DAN DAERAH OTONOM BARU

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonom Baru (DOB) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota.

Untuk :

KESATU : Khusus kepada:
a. Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026;

- ❖ Amanat UU No. 10 Tahun 2016 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada November 2024.
- ❖ Untuk daerah yang masa berlaku RPJMD akan berakhir di tahun 2023, diamanatkan menyusun RPD dan RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- ❖ Dokumen RPD akan digunakan Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2024-2026.
- ❖ RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui PERKADA.

1. RPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2. RENSTRA PD



bappeda_kaltim

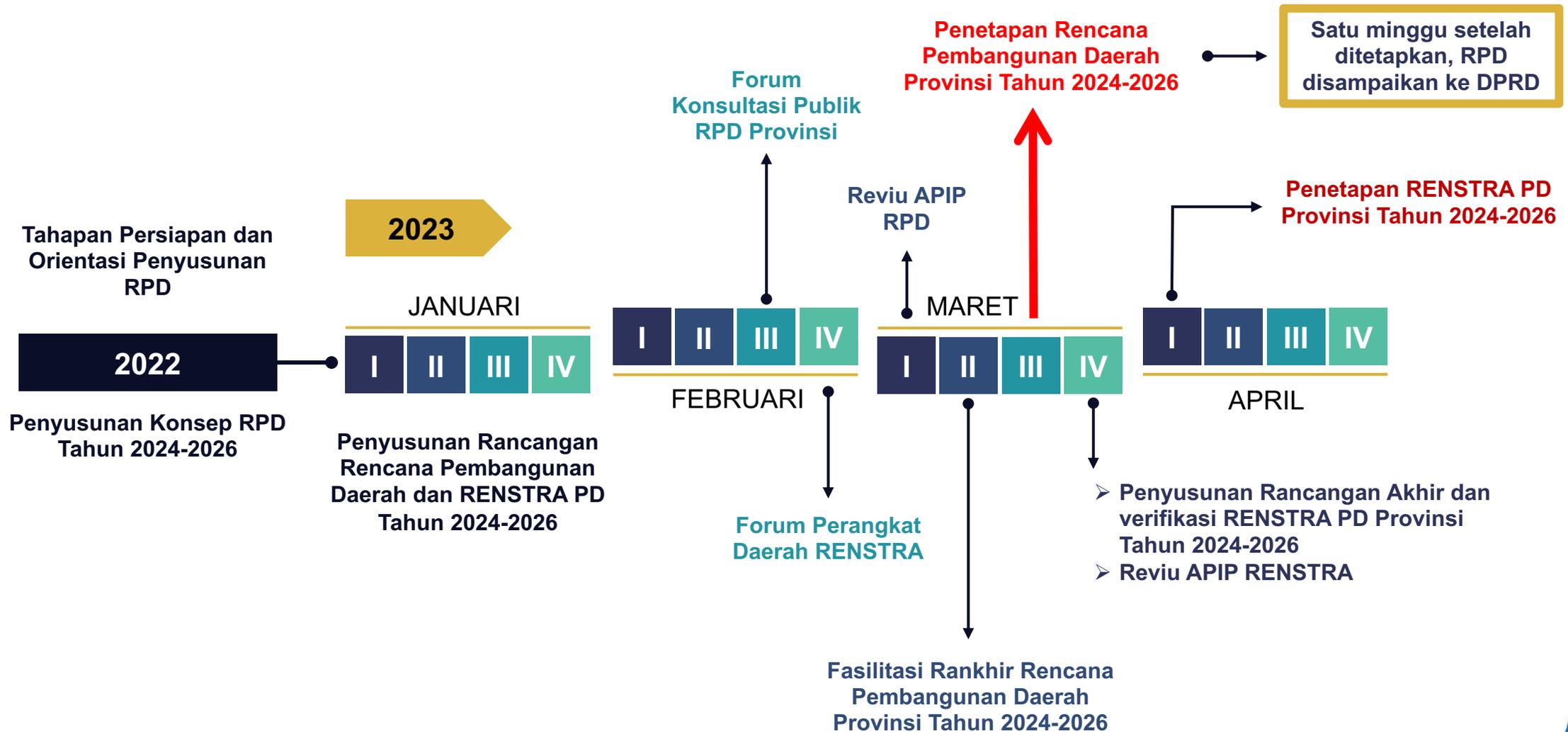


Bappeda Kaltim



bappeda.kaltimprov.go.id

JADWAL PENYUSUNAN RPD 2024-2026





PENDEKATAN PENYUSUNAN RPD

Isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku

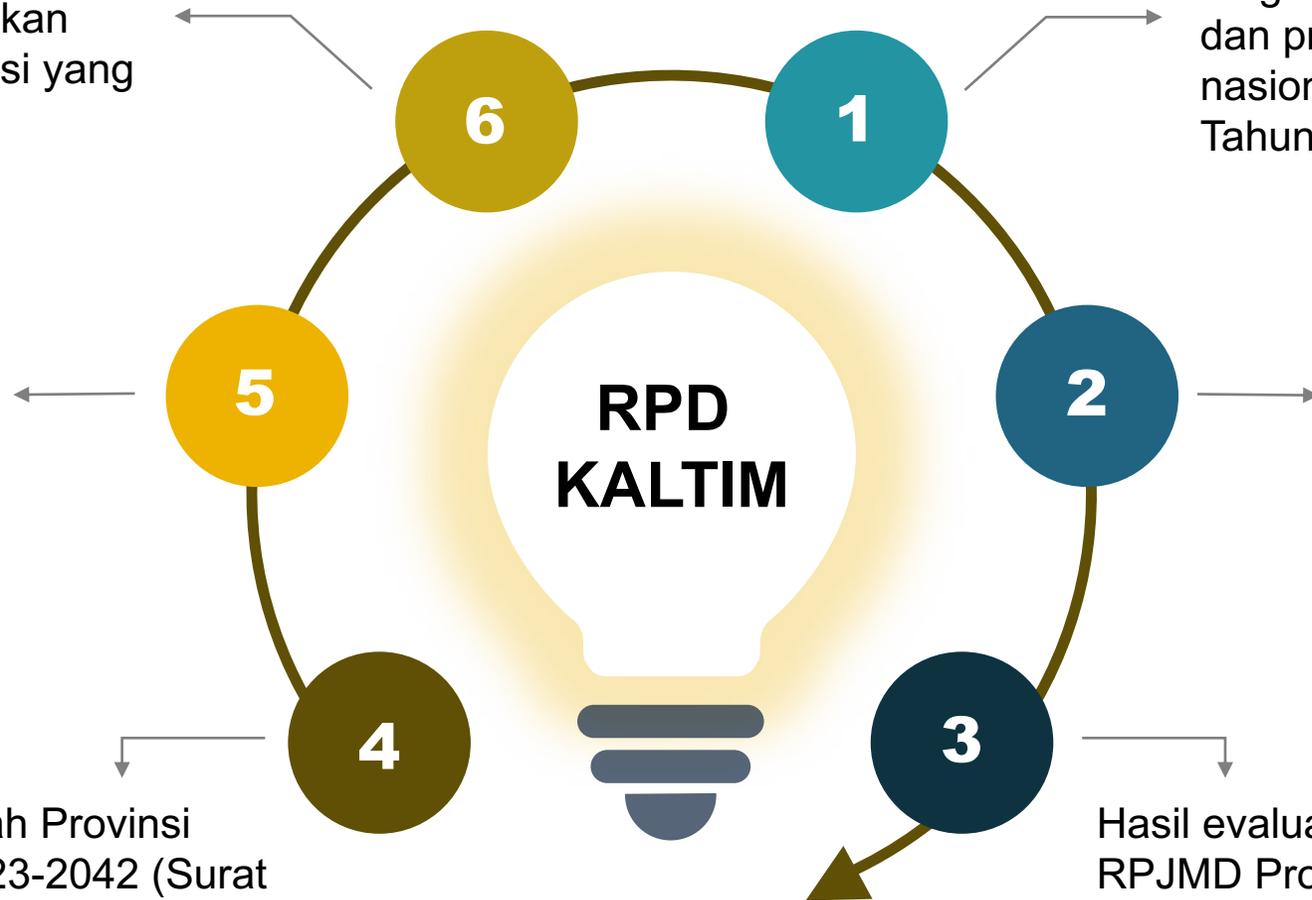
Target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (PERGUB No. 79 Tahun 2019)

Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Surat Menteri ATR/BPN No B/PB.01/280/II/2023 tentang Persetujuan Substansi Revisi RTRW Kaltim)

Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023 Tahun ke-Empat



CAPAIAN PEMBANGUNAN ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA



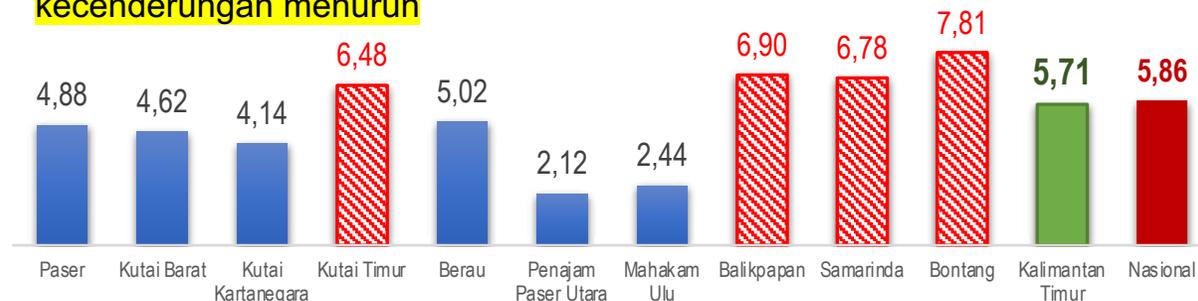
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2022

IPM Kaltim berada diatas Nasional. Terdapat 3 kab/kota dengan IPM terendah Kaltim, yaitu Mahulu, PPU, Kubar. Tren IPM Kaltim sejak tahun 2018 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat

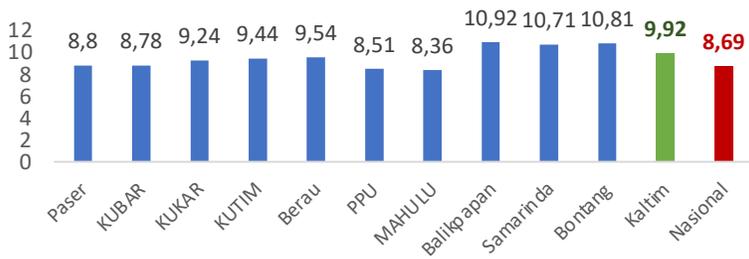


TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2022 (%)

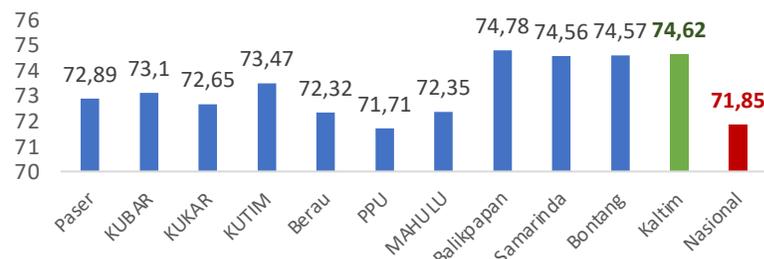
TPT Kaltim masih lebih baik dari Nasional. Terdapat 4 kab/kota yang TPT-nya masih diatas rata-rata Kaltim, yaitu Bontang, Balikpapan, Samarinda dan Kutim. Tren TPT Kaltim sejak tahun 2018 fluktuatif dengan kecenderungan menurun



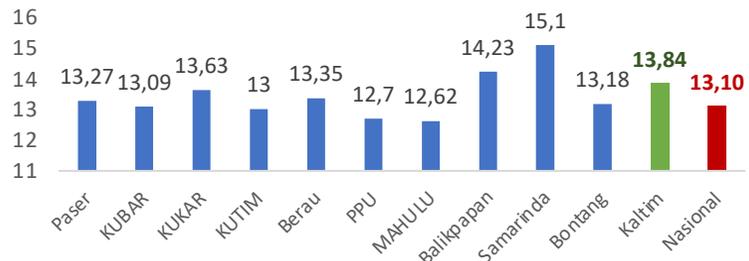
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022 (tahun)



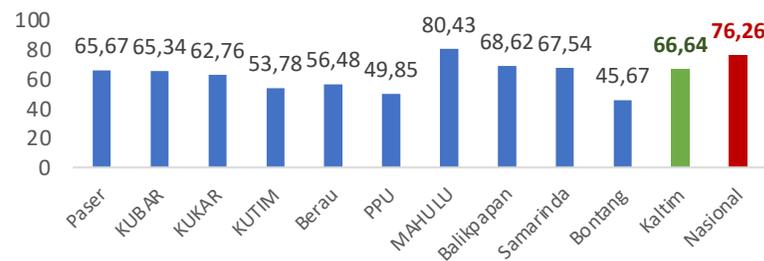
Usia Harapan Hidup Tahun 2022 (tahun)



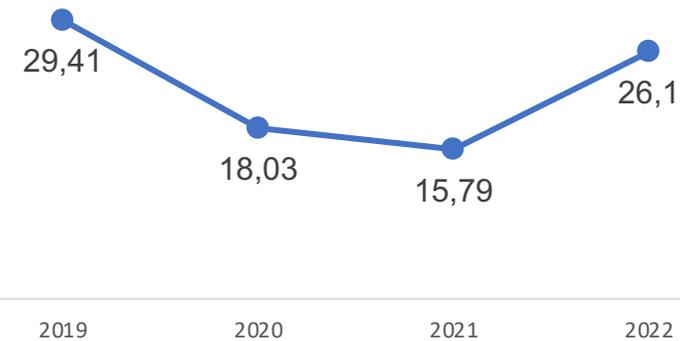
Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 (tahun)



Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2021



Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)

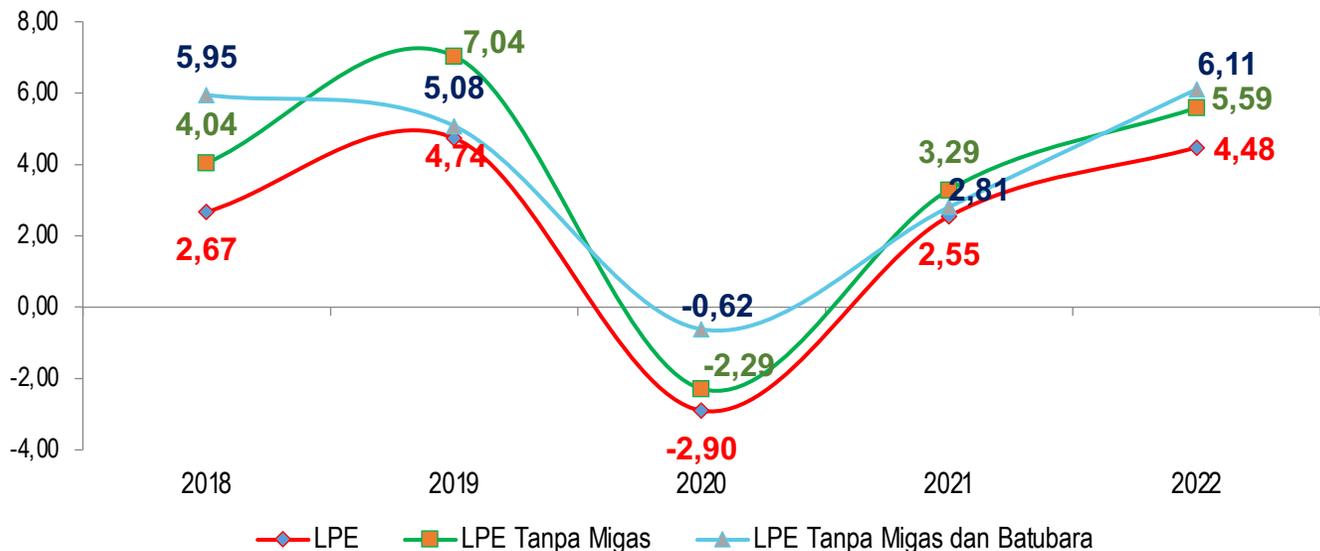


Sumber: BPS Kaltim, 2022

CAPAIAN PEMBANGUNAN ASPEK EKONOMI WILAYAH



LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)



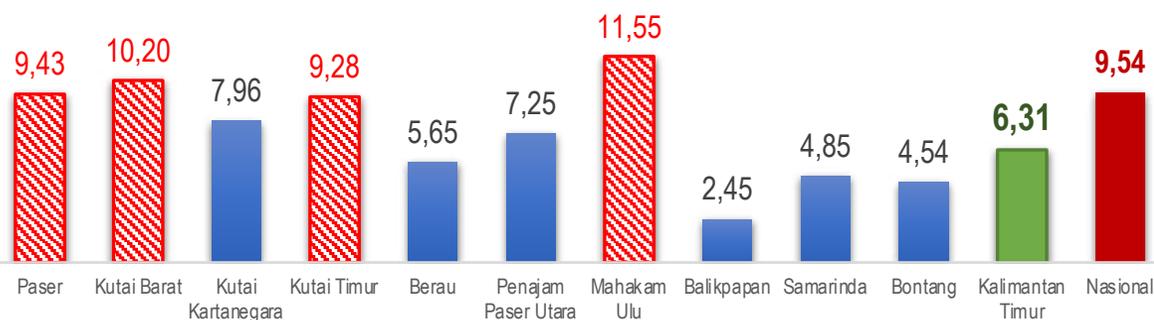
DISTRIBUSI PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA



Nilai PDRB Tahun 2021 = Rp 696,6 T dan Tahun 2022 = Rp 921,3 T

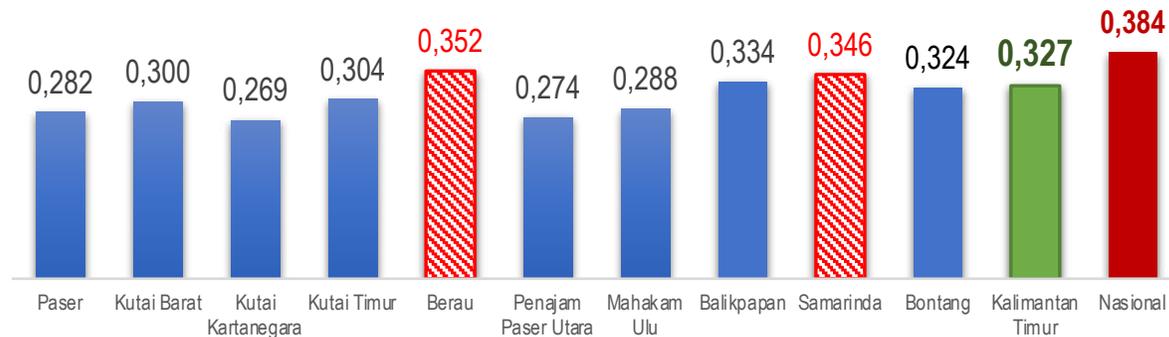
TINGKAT KEMISKINAN TAHUN 2022 (%)

Tingkat Kemiskinan Kaltim lebih baik dari Nasional. Terdapat 4 kab/kota dengan Kemiskinan tertinggi di Kaltim, yaitu Mahulu, Kubar, Paser dan Kutim. Tren tingkat kemiskinan Kaltim sejak tahun 2018 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat



INDEKS GINI TAHUN 2022

Indeks Gini Kaltim lebih baik dari Nasional, menjadi 0,334. Terdapat 2 kab/kota yang indeks gini-nya masih diatas rata-rata Kaltim, yaitu Berau dan Samarinda. Tren indeks gini Kaltim sejak tahun 2018 fluktuatif dengan kecenderungan menurun

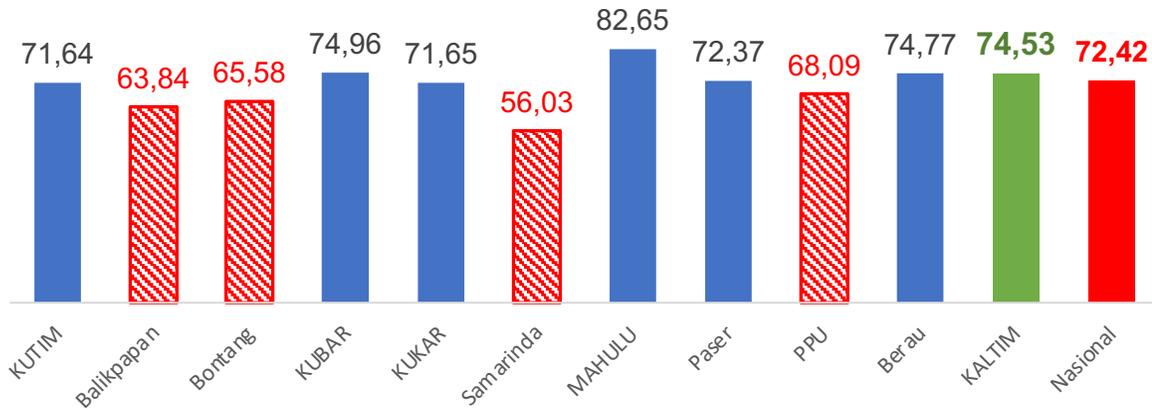


Sumber: BPS Kaltim, 2022

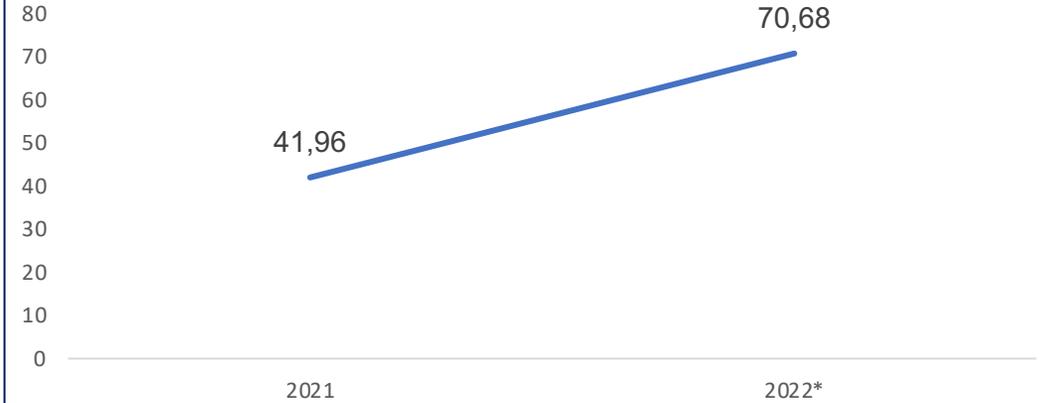
CAPAIAN PEMBANGUNAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP



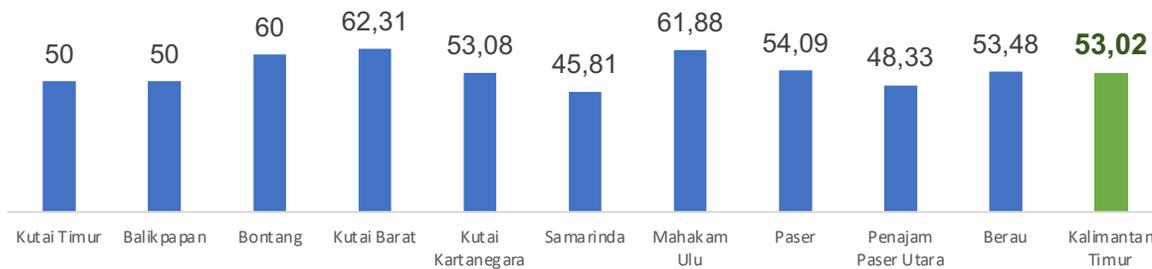
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022



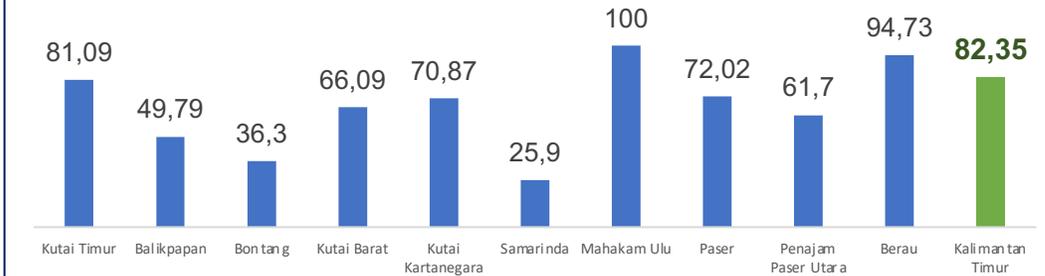
PERSENTASE PENURUNAN EMISI DARI BUSINESS AS USUAL (BAU) (%)



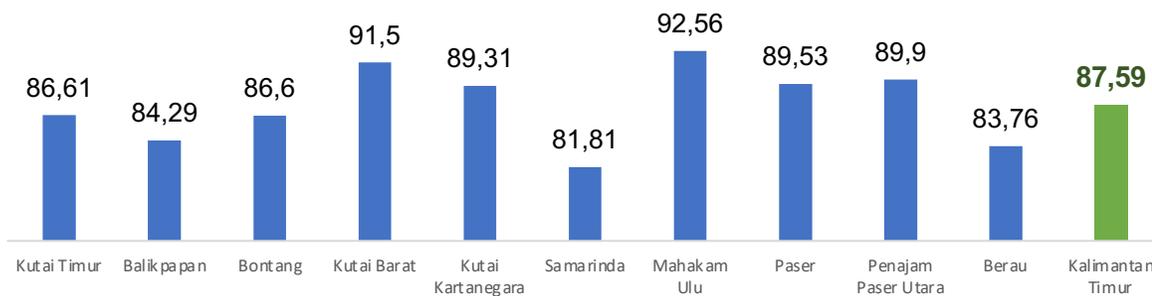
Indeks Kualitas Air Tahun 2022



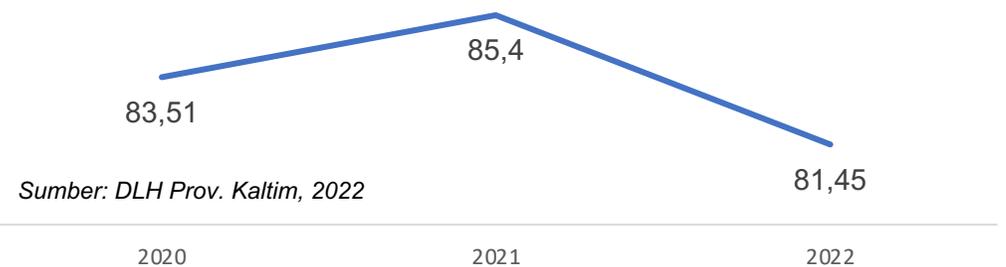
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022



Indeks Kualitas Udara Tahun 2022



Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2020 - 2022

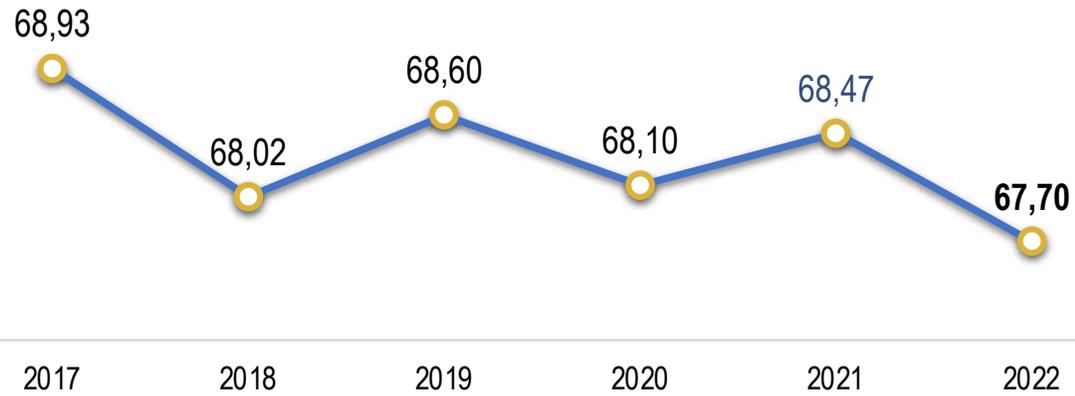


Sumber: DLH Prov. Kaltim, 2022

ASPEK TATA KELOLA PEMERINTAHAN

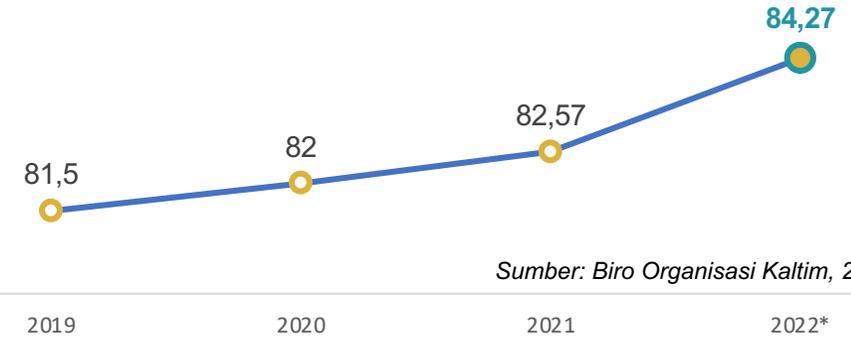


INDEKS REFORMASI BIROKRASI



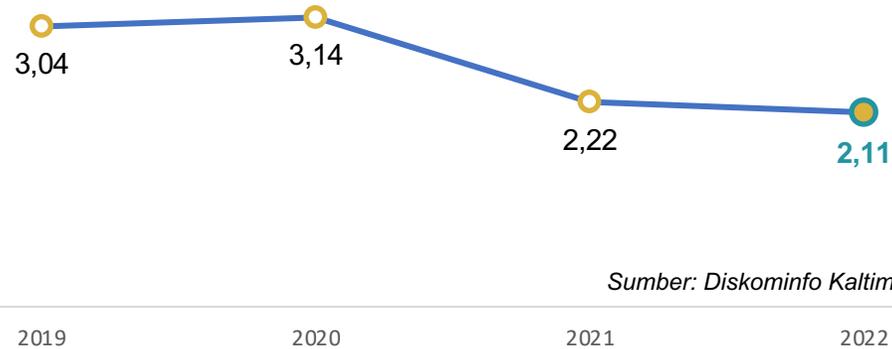
Sumber: KEMENPANRB, 2022

Indeks Kepuasan Masyarakat



Sumber: Biro Organisasi Kaltim, 2022

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



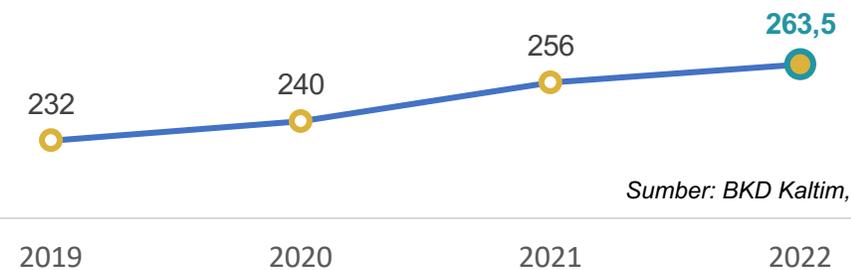
Sumber: Diskominfo Kaltim, 2022

Nilai Akuntabilitas Kinerja



Sumber: Biro Organisasi Kaltim, 2022

Sistem Merit



Sumber: BKD Kaltim, 2022

Tingkat Maturitas SPIP di tahun 2019-2022 berada pada level 3

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR



A

Aspek Sumber Daya Manusia

1. Belum terpenuhinya akses pendidikan wajib belajar 12 tahun secara merata;
2. Belum optimalnya akses dan layanan fasilitas Kesehatan kepada masyarakat terutama pada wilayah 3T;
3. Masih rendahnya penempatan tenaga kerja dari pencari kerja;
4. Masih rendahnya daya saing perempuan dibidang ekonomi, sosial dan politik.

B

Aspek Ekonomi Wilayah

1. Perekonomian daerah masih mengandalkan pada sektor ekstraktif;
2. Dalamnya tingkat kemiskinan akibat rendahnya rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat miskin;
3. Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur pendukung ekonomi.

C

Aspek Lingkungan Hidup

1. Kurang terjaganya kualitas air, air laut, udara dan tutupan lahan
2. Tingginya potensi peningkatan emisi akibat pemanfaatan ruang sektor berbasis lahan
3. Masih rendahnya bauran energi baru dan terbarukan

D

Aspek Tata Kelola Pemerintahan

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Masih rendahnya kapasitas dan manajemen kinerja aparatur pemerintahan
3. Masih rendahnya implementasi SPBE dalam pengelolaan pemerintahan
4. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pada beberapa Perangkat Daerah

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN



INTERNASIONAL

1. Komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan perubahan Iklim
2. Transisi Energi
3. Potensi terjadinya krisis ekonomi global akibat gangguan rantai pasok dan bencana iklim
4. Tantangan kerawanan pangan dan kesehatan masyarakat
5. Stagflasi ekonomi dan Inflasi Tinggi akibat perang Rusia-Ukraina

NASIONAL

1. Penuntasan RPJMN Tahun 2020-2024
2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
3. Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024
4. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
5. Percepatan penanganan stunting
6. Peningkatan Reformasi Birokrasi

DAERAH

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
2. Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

PERUMUSAN KONSEP RPD KALTIM 2024-2026



Misi RPJPD Kaltim 2005-2025 (Perda 15 Tahun 2008)	Agenda Pemb. RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)	Misi RPJMD 2019-2023 (Perda 8 Tahun 2021)	Isu Strategis Daerah 2024-2026	RPD Kaltim 2024-2026
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Aspek Sumber Daya Manusia
Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Aspek Ekonomi Wilayah
Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional	Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur	
Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Aspek Lingkungan Hidup
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Aspek Tata Kelola Pemerintahan

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024-2026



TEMA PEMBANGUNAN

2024

Peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan

2025

Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing

2026

Pemantapan kapasitas daerah sebagai mitra IKN

PRIORITAS PEMBANGUNAN

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RPD KALTIM 2024-2026 (1)



Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Terkini	Perkiraan Target		
			2024	2025	2026
Aspek Sumber Daya Manusia					
Tujuan 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing; <i>yang dimaksud adalah SDM yang memiliki IPM tinggi dan terus meningkat serta tidak ada kabupaten/kota dengan IPM tertinggal (dibawah rata-rata nasional). Selain itu, menurunnya TPT sebagai dampak diserapnya tenaga kerja lulusan SMK/ sederajat keatas juga menjadi ukuran keberhasilan peningkatan daya saing SDM. Perwujudan daya saing SDM dilakukan dengan pemerataan taraf pendidikan, pemerataan kesehatan, peningkatan usia harapan hidup, dan pemberdayaan gender</i>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,44 (Tahun 2022)	78,14	78,53	78,92
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,71 (Tahun 2022)	5,46	5,30	5,14
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,84 (Tahun 2022)	14,04	14,09	14,15
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,92 (Tahun 2022)	10,25	10,32	10,40
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,62 (Tahun 2022)	74,88	75,02	75,15
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja (%)	26,10 (Tahun 2022)	27,20	27,60	28,10
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,64 (Tahun 2021)	67,31	67,64	67,98

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RPD KALTIM 2024-2026 (2)



Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Terkini	Perkiraan Target		
			2024	2025	2026
Aspek Ekonomi Wilayah					
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas <i>yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stabil dan resilien dengan tidak mengandalkan pada sektor ekstraktif, sehingga dilakukan diversifikasi ekonomi (horizontal dan vertikal) pada sektor ekonomi unggulan untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh pada kisaran 3-5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu mensejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang;</i>	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,48 (Tahun 2022)	4 - 5	4 - 5	4 - 5
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,31 (Tahun 2022)	5,78	5,67	5,55
	Indeks Gini	0,327 (Tahun 2022)	0,307	0,306	0,305
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara (%)	6,11 (Tahun 2022)	5,5 – 6,5	5,5 – 6,5	5,5 – 6,5
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,989 (Tahun 2022)	0,940	0,917	0,894
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,226 (Tahun 2022)	0,215	0,209	0,204
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	76,65 (Tahun 2022)	80,19	83,25	86,05

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RPD KALTIM 2024-2026 (3)



Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Terkini	Perkiraan Target		
			2024	2025	2026
Aspek Lingkungan Hidup					
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup <i>yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air, air laut, udara, lahan, bersinergi dengan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan</i>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,46 (Tahun 2022)	75,00 (Baik)	75,10 (Baik)	75,20 (Baik)
	Persentase Penurunan Emisi dari Bussiness As Usual (BAU) (%)	70,68 (Tahun 2022)	31,05	31,89	32,03
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	53,02 (Tahun 2022)	53,52	53,62	53,72
	Indeks Kualitas Air Laut	81,45 (Tahun 2022)	81,95	82,05	82,15
	Indeks Kualitas Udara	87,59 (Tahun 2022)	88,17	88,27	88,37
	Indeks Kualitas Lahan	81,85 (Tahun 2022)	82,35	82,45	82,55
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)	81,28 (Tahun 2022)	23,32	24,40	25,49
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (%)	7,27 (Tahun 2022)	10,39	12,39	14,68

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RPD KALTIM 2024-2026 (4)



Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Terkini	Perkiraan Target		
			2024	2025	2026
Aspek Tata Kelola Pemerintahan					
Tujuan 4: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan BerAKHLAK yang Berorientasi Pelayanan Publik <i>yang dimaksud adalah penerapan core value ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik yang berjalan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu memberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	B (67,70) (Tahun 2022)	B (69,00)	B (69,50)	BB (70,01)
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang profesional dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,41 (Tahun 2022)	85,00	85,50	86,00
	Sistem Merit	263,5 (Tahun 2022)	270	275	280
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,11 (Tahun 2022)	2,90	3,00	3,10
Sasaran 12: Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (78,10) (Tahun 2022)	BB (78,50)	BB (79,30)	A (80,01)
	Tingkat maturitas SPIP	Level 3 Skor 3,226 (Tahun 2022)	Level 3 Skor 3,476	Level 3 Skor 3,726	Level 3 Skor 3,976

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024-2026



Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat

STRATEGI

Peningkatan akses dan mutu pendidikan

Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

STRATEGI

Peningkatan akses dan mutu kesehatan

Sasaran 3: Meningkatnya daya saing tenaga kerja

STRATEGI

1. Perluasan kesempatan kerja
2. Peningkatan mutu dan daya saing tenaga konstruksi

Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan

STRATEGI

Penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
2. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan
4. Optimalisasi Boarding School
5. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu
6. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
7. Peningkatan literasi dan numerasi
8. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar

1. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
2. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
3. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta
4. pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
6. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya
7. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
8. Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan
9. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan

1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
2. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri
3. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
4. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
5. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja
6. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan
2. Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik
3. Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan
4. Pemberdayaan gender antarwilayah
5. Peningkatan perlindungan perempuan serta perlindungan dan pemenuhan hak anak

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024-2026



Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi

STRATEGI

Pembangunan ekonomi inklusif

Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin

STRATEGI

Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan

Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar

STRATEGI

Optimalisasi pemenuhan infrastruktur terutama pada kawasan strategis

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir
2. Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri
3. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri
4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital
5. Peningkatan SDM UKM/IKM untuk tumbuh menjadi eksportir
6. Peningkatan dukungan kemudahan pengurusan ekspor dan kemudahan memperoleh pinjaman bagi UKM/IKM
7. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata
8. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas subsektor kehutanan
9. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan

9. Pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kapasitas usaha kelompok masyarakat, serta peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.
10. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
11. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak
12. Penguatan kelembagaan peternakan
13. Peningkatan produksi perikanan
14. Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan
15. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura
16. Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian
17. Peningkatan iklim usaha dan investasi
18. Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis Online Single System (OSS)

1. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
2. Peningkatan keberfungsian sosial PPKS
3. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
4. Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial
5. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi
6. Peningkatan Daya Saing UMKM
7. Pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk kemandirian berusaha
8. Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa
9. Peningkatan penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak

1. Peningkatan Pelayanan Jalan Provinsi
2. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan provinsi
3. Pembangunan Jalan pada kawasan pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan pelayanan terminal tipe B
5. Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan ketersediaan air
6. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir
7. Peningkatan pemenuhan akses sanitasi
8. Peningkatan kualitas dan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
9. Perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan perbatasan, terluar, dan terpencil
10. Penguatan distribusi barang khususnya komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan
11. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik
12. Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang
13. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
14. Pengimplementasian kebijakan satu peta

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024-2026



Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan

STRATEGI

Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan

Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan

STRATEGI

Penurunan emisi GRK dari sektor lahan

Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

STRATEGI

Percepatan transisi energi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi dari fosil

Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Sasaran 12: Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel

STRATEGI

Reformasi Birokrasi pemerintah daerah

ARAH KEBIJAKAN

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Pengendalian pencemaran air
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
4. Pengendalian pencemaran udara
5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan dan hutan
6. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
7. Pemeliharaan dan Perlindungan Wilayah-Wilayah Penyedia Jasa LH

1. Penurunan Deforestasi dan Degradasi Hutan
2. Pengelolaan Hutan Lestari Berkelanjutan
3. Peningkatan Peranan Konservasi Hutan
4. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI)
5. Rehabilitasi Kawasan Hutan (Regenerasi/tanpa penebangan)
6. Rehabilitasi Hutan Produksi dan Lahan (Dengan Rotasi)
7. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
8. Peningkatan pengelolaan DAS
9. Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan
10. Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan

1. Pemanfaatan limbah industri pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi secara terintegrasi dengan industrinya
2. Pengembangan dan pemanfaatan biodiesel sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
3. Pengembangan energi surya mencakup pemanfaatan PLTS di perdesaan dan perkotaan
4. Pengembangan infrastruktur EBT
5. Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan EBT
6. Peningkatan edukasi kepada para pihak terutama masyarakat untuk penerapan EBT

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT
2. Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
3. Deregulasi Kebijakan
4. Penyederhanaan Organisasi
5. Perbaikan Tata Laksana
6. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
7. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
8. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran
9. Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
10. Peningkatan kinerja perangkat daerah dan aparatur
11. Penguatan Pengawasan
12. Optimalisasi kerja sama daerah yang sinergi dengan pembangunan IKN

PROYEKSI PENERIMAAN DAERAH TAHUN 2024-2026



KODE REK	KOMPONEN PENERIMAAN	Target Tahun 2023 (Jt Rp)	Proyeksi Tahun			
			2024 (Jt Rp)	2025 (Jt Rp)	2026 (Jt Rp)	Rata2 tumbuh (%)
	Penerimaan Daerah	17.200.000	16.724.886	18.441.560	20.036.105	8,98
4	Pendapatan Daerah	14.621.856	16.224.886	17.841.560	19.336.105	9,77
4.1	Pendapatan Asli Daerah	8.045.500	9.162.334	10.321.883	11.240.655	11,81
4.1.01	Pajak Daerah	7.010.000	7.952.500	9.035.100	9.865.700	12,08
4.1.02	Retribusi Daerah	20.052	14.080	15.035	16.227	(5,03)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	232.740	244.444	264.374	295.305	8,29
4.1.04	Lain-Lain PAD yang sah	782.707	951.309	1.007.374	1.063.424	11,00
4.2	Pendapatan Transfer	6.562.497	7.048.691	7.505.812	8.081.582	7,19
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.562.497	7.048.691	7.505.812	8.081.582	7,19
4.2.01.01	Dana Perimbangan	6.562.497	7.038.691	7.495.812	8.071.582	6,48
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - DBH	5.021.968	5.495.021	5.934.852	6.493.049	8,94
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	957.919	872.371	887.066	902.009	(1,85)
4.2.01.01.03	DAK Fisik	190.152	192.713	195.309	197.939	1,35
4.2.01.01.04	DAK Non Fisik	492.456	478.586	478.586	478.586	(0,94)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	10.000	10.000	10.000	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.858	13.862	13.864	13.867	0,02
4.03.01	Hibah	13.858	13.862	13.864	13.867	0,02
6	Pembiayaan Daerah	2.578.143	500.000	600.000	700.000	16,67
6.1	Penerimaan Pembiayaan (SiLPA)	2.578.143	500.000	600.000	700.000	16,67

1. Target PAD diproyeksikan terus meningkat seiring dengan akan efektifnya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. proyeksi kontribusi sebesar 87% pada tahun 2024 dan 88% pada tahun 2026 (Implementasi kebijakan opsen pada PKB dan BBNKB);
2. Penerimaan PKB terus tumbuh karena adanya penambahan kendaraan bermotor baru sebesar 19% pertahun dan peningkatan realisasi penerimaan PKB dari penerimaan pembayaran tunggkan sebesar 40% pertahun;
3. Membaiknya kondisi perekonomian terutama momentum pembangunan IKN diperkirakan meningkatkan target Proyeksi Bea BBNKB sebesar 55%;
4. Tren peningkatan volume kebutuhan BBM dan peningkatan harga minyak dunia diperkirakan mempengaruhi Proyeksi PBBKB meningkat 17,79%;
5. Penurunan target retribusi daerah dikarenakan adanya obyek retribusi daerah yang dihapus seiring dengan pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
6. Perkiraan masih terus membaiknya perekonomian Kaltim terutama komponen ekspor karena permintaan batubara & migas pada pasar internasional terus terjaga, sehingga mendorong pertumbuhan DBH sebesar 8,94% tahun 2024-2026.

Sumber: BAPENDA dan BPKAD, tahun 2023

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN



NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKASI PENGAMPU UTAMA
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing tenaga kerja		
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan		
7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi		
8	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Kehutanan
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
10	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
11	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN



NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKASI PENGAMPU UTAMA
12	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
14	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH DAN USAHA MIKRO	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan
		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
18	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
19	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Perkebunan
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
20	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
21	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan
22	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN



NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKASI PENGAMPU UTAMA
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin		
24	PROGRAM PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
25	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
26	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar		
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Dinas Perhubungan
28	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
29	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
30	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
31	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
33	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
34	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
35	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan		
36	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan		
37	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Kehutanan
38	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Dinas Kehutanan

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN



NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKASI PENGAMPU UTAMA
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas Kehutanan
40	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Dinas Kehutanan
41	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan		
42	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
43	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		
44	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah
45	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
46	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Biro Organisasi
47	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
48	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sasaran 12: Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel		
49	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Biro Organisasi
50	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
51	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal	Target		
			2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,44 (Tahun 2022)	78,14	78,53	78,92
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,71 (Tahun 2022)	5,46	5,3	5,14
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,48 (Tahun 2022)	4-5	4-5	4-5
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,31 (Tahun 2022)	5,78	5,67	5,55
5	Indeks Gini	0,327 (Tahun 2022)	0,307	0,306	0,305
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,46 (Tahun 2022)	75,00 (Baik)	75,10 (Baik)	75,20 (Baik)
7	Persentase Penurunan Emisi dari Bussiness As Usual (BAU) (%)	70,68 (Tahun 2022)	31,05	31,89	32,03
8	Indeks Reformasi Birokrasi	B (67,70) (Tahun 2022)	B (69,00)	B (69,50)	BB (70,01)
9	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,84 (Tahun 2022)	14,04	14,09	14,15
10	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,92 (Tahun 2022)	10,25	10,32	10,40
11	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,62 (Tahun 2022)	74,88	75,02	75,15
12	Persentase penempatan tenaga kerja (%)	26,10 (Tahun 2022)	27,20	27,60	28,10
13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,64 (Tahun 2021)	67,31	67,64	67,98
14	LPE Non Migas dan Batubara (%)	6,11 (Tahun 2022)	5,5-6,5	5,5-6,5	5,5-6,5
15	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,989 (Tahun 2022)	0,940	0,917	0,894
16	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,226 (Tahun 2022)	0,215	0,209	0,204
17	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	76,65 (Tahun 2022)	80,19	83,25	86,05
18	Indeks Kualitas Air	53,02 (Tahun 2022)	53,52	53,62	53,72
19	Indeks Kualitas Air Laut	81,45 (Tahun 2022)	81,95	82,05	82,15
20	Indeks Kualitas Udara	87,59 (Tahun 2022)	88,17	88,27	88,37
21	Indeks Kualitas Lahan	81,85 (Tahun 2022)	82,35	82,45	82,55
22	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)	81,28 (Tahun 2022)	23,32	24,40	25,49
23	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (%)	7,27 (Tahun 2022)	10,39	12,39	14,68
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,41 (Tahun 2022)	85,00	85,50	86,00
25	Sistem Merit	263,5 (Tahun 2022)	270	275	280
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,11 (Tahun 2022)	2,90	3,00	3,10
27	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (78,10) (Tahun 2022)	BB (78,50)	BB (79,30)	A (80,01)
28	Tingkat maturitas SPIP	Level 3 Skor 3,226 (Tahun 2022)	Level 3 Skor 3,476	Level 3 Skor 3,726	Level 3 Skor 3,976



TERIMA KASIH

